



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Profil Anggota DPR-DPD RI 2019-2024
Tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 19

Profil Anggota DPR-DPD RI 2019-2024

Pada Selasa, 1 Oktober 2019 lalu, anggota DPR dan DPD RI periode 2019-2024 resmi dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan sebelum memulai tugas-tugasnya. Sebanyak 575 anggota DPR RI, terdiri dari 455 laki-laki dan 120 perempuan (20,86 persen); dan 136 anggota DPD RI, yang terdiri dari 94 laki-laki dan 42 perempuan (30,14 persen), itu pun kini telah menandatangani gelatir sebagai wakil rakyat. Banyak harapan kepada para anggota baru untuk memperbaiki kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI melakukan riset tentang profil anggota legislatif 2019-2024. Data dikumpulkan berdasarkan hasil keputusan KPU RI yang diserahkan pada tanggal 21 Mei 2019. Ada beberapa temuan penting yang menunjukkan optimisme sekaligus pesimisme terhadap kinerja legislatif 5 tahun ke depan. Berikut ini petikannya:

1. Perolehan Kursi Partai Politik DPR RI

- a. PDIP mengalami peningkatan jumlah kursi yang signifikan dibandingkan tahun 2014 (naik dari 109 menjadi 128 kursi); Gerindra mendapatkan kenaikan sedikit (naik dari 73 menjadi 78); PKS juga mengalami hal yang sama (naik dari 47 menjadi 58); Nasdem (35 menjadi 59); PKS (40 menjadi 50).
- b. Golkar mengalami penurunan jumlah kursi (dari 91 menjadi 85); Demokrat juga mengalami hal yang sama (61 menjadi 54); PAN (49 menjadi 44); dan PPP (38 menjadi 19).
- c. Nasdem dan PKS tampaknya memperoleh peningkatan jumlah kursi dan suara dari pencalonan pilpres, meski ini harus dikonfirmasi dari mereka. Penghitungan saintis juga ternyata memudahkan bagi partai besar namun merepotkan bagi partai menengah dan kecil.
- e. Peluang partai baru seperti Perindo, PSI dan Berkarya cukup baik, namun terhalang dengan keputusan ambang batas parlemen. Dari status kandidasi, sebanyak 65 persen caleg terpilih merupakan orang baru (bukan pejabat/incumbent). Hal tersebut sama seperti Pemilu 2014. Namun demikian, sebagian besar mereka adalah caleg yang berpengalaman dalam pemilu dan pilkada sebelumnya. Hal yang juga menarik adalah terdapat 103 (dari 575) caleg terpilih yang merupakan pejabat yang masih bertahan dalam 3 pemilu terakhir ini (2009, 2014, 2019).

Di samping itu, ditemukan bahwa apabila dilihat dari hasil penghitungan suara (form DC1), maka sebanyak 66 persen sampel coblosan ada untuk para caleg ketimbang partai politik. Hal yang berbeda dengan temuan di tahun 2014 yang masih banyak pemilih mencoblos lambang partai.

2. Caleg Perempuan DPR RI Terpilih

- Beberapa hal yang menarik adalah:
- a. Dari pencalonan, tidak ada hal yang berubah karena sebagian besar partai hanya berorientasi dalam syarat formal pencalonan (minimal 30 persen).
 - b. Namun dari hasil pemilu dari caleg yang terpilih, maka caleg perempuan di Pemilu 2019 ini menorehkan prestasi membanggakan dengan capaian 20,86 persen (paling tinggi sejak tahun 2004).
 - c. Pencapaian terbaik dalam pemilu ini adalah Nasdem dengan keterpilihan caleg perempuan sebanyak 32,2 persen. Nasdem adalah partai politik pertama yang berhasil menembus angka 30 persen sejak pertama kali kebijakan ini diterapkan. Di samping itu, PKS juga memperoleh pencapaian luar biasa dengan peningkatan yang tajam dari 2,5 persen (2014) menjadi 16 persen (2019) atau setara 8 kali lipat.

Dari data yang dikumpulkan, pemilih masih memilih berdasarkan nomor urut atas (1, 2 ataupun 3). Sebanyak 48 persen dan 68 persen caleg terpilih perempuan dan laki-laki berada di posisi nomor 1. Hal ini memang tidak berbeda dengan hasil pemilu 2014 yang lalu dan kembali menegaskan bahwa posisi caleg di nomor atas tetap menjadi penting bagi pemilih.

Sebanyak 53 persen caleg terpilih perempuan memiliki latar belakang aktivis partai politik (pengurus partai ataupun orang yang sudah punya pengalaman panjang dalam kompetisi pemilu). Sekitar 41 persen diindikasikan dan memiliki afiliasi dengan kekerabatan politik seperti keluarga, dinasti ataupun klan. Namun, pengurus partai yang juga berlatar belakang kekerabatan politik juga menguatkan keterpilihan mereka. Sisanya sekitar 6 persen berasal dari kalangan profesional yang baru pertama kali ikut dalam kompetisi pemilu.

Puskapol UI juga mencatat dapil yang memiliki caleg perempuan terpilih terbanyak berasal dari Bengkulu (75 persen), Sulawesi Utara dan Maluku Utara (masing-masing sama sebanyak 66 persen). Namun, masih ada 20 dapil (dari 80 dapil) yang belum ada caleg perempuan terpilih di Pemilu 2019 ini.

3. Caleg Perempuan DPD RI Terpilih

Caleg perempuan DPD terpilih mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya dan telah menembus angka 30 persen. Di samping itu, sebanyak 68 persen adalah caleg bukan pejabat. Namun, mereka punya pengalaman dalam pemilu lainnya karena berasal dari pengurus partai politik ataupun pernah berkompetisi di pilkada. Secara khusus, dapil dengan jumlah perempuan calon DPD terpilih terbanyak ada di Sumatra Selatan (4 orang/maksimal). Sebaliknya, dapil Aceh dan Bali tidak pernah ada caleg perempuan DPD terpilih sejak tahun 2009. Khusus di Pemilu 2019 ini, ada 8 dapil yang tidak ada caleg perempuan DPD terpilih yaitu di Aceh, Bali, Kepri, Babel, Kalbar, Sulteng, Sulbar, dan Papua Barat.

4. Siapa Mereka?

Apabila merujuk studi Aspinall dan Berenschot (2019) tentang konteks demokrasi di Indonesia-kekinian, maka mereka mengatakan bahwa relasi patronase dan strategi klientalisme mendominasi berbagai kompetisi pemilu di tingkat nasional ataupun lokal. Hasil Pemilu 2019 ini mengonfirmasi bahwa temuan mereka juga terjadi di tingkat nasional.

Oleh karena adanya kecenderungan pemilih memilih para caleg secara langsung dan menandai bahwa alasan personalisasi dan ketokohan para caleg adalah penting, maka para caleg pun juga merasa harus memobilisasi kekuatan mereka, di antaranya tentu aspek kekerabatan dan juga klientalisme tadi. Aspek kekerabatan politik yang dimaksud adalah tentu yang berkaitan dengan dinasti politik, keluarga politik, ataupun klan politik yang terbukti kuat di tingkat lokal. Sementara itu, aspek klientalisme lebih menonjolkan bagaimana para caleg melakukan upaya transaksi material dalam mobilisasi dukungan mereka di pemilu.

Secara khusus, apabila diperhatikan caleg DPD yang terpilih, latar belakang dan profil mereka pun juga tidak berbeda dengan caleg DPR yaitu mereka adalah orang "kuat" lokal dan mantan pejabat daerah yang ingin kembali bertarung di kompetisi pemilu. Untuk memperkuat itu, sebagian besar dari mereka tentu punya afiliasi partai politik dan memanfaatkan jejaring partai tersebut dalam mobilisasi dukungan pemilih.

Dalam konteks keterwakilan perempuan, Puskapol UI sangat mengapresiasi capaian dalam Pemilu 2019 ini karena mampu menembus angka 20 persen dengan salah satu partai, Nasdem, mencapai lebih dari 30 persen. Peningkatan ini terjadi karena sebagian besar caleg terpilih ditempatkan dan mendapat posisi yang baik di nomor urut atas; kemampuan mereka dalam meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya; serta keberhasilannya memobilisasi jejaring kerabat dan strategi klientalisme.

Namun, bila diperhatikan, caleg perempuan terpilih Nasdem yang sebagian besar ditempatkan pada nomor urut bawah dapat memperoleh kursi karena ternyata sebagian besar dari mereka berasal dari dinasti politik. Hal yang berbeda di PKS, posisi caleg perempuan terpilih berada di nomor urut atas dan juga sebagian berasal dari dinasti politik. Di samping itu, faktor yang juga menentukan adalah pengalaman para caleg perempuan terpilih yang telah berkompetisi di berbagai pemilu sebelumnya (pileg dan pilkada) mampu membuktikan kemampuan mereka dalam mobilisasi dukungan pemilih.

Meskipun para anggota DPR dan DPD terpilih ini banyak berasal dari kelompok bukan pejabat, termasuk perempuan, Puskapol UI merasa bahwa kinerja anggota DPR dan DPD RI dalam periode 2019-2024 tidak akan mengalami perubahan besar. Salah satu penyebab pentingnya adalah kehadiran mereka nanti tentu sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik lokal (oligark dan elite lainnya) yang berkecenderungan dalam aktivitas parlemen mereka.

Di samping itu, masih kuatnya pengaruh biaya politik mahal yang ada di setiap caleg, maka akan mempertahankan *mindset* para anggota DPR terpilih nanti untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, tantangan bagi kelompok masyarakat sipil yang akan terus mengawasi dan mengawal lembaga legislatif kita, tentu kebijakan yang pro terhadap kelompok oligarki dan elite lainnya masih harus terus diperhatikan agar kebijakan yang pro rakyat terus hadir di DPR dan DPD kita.

■ Nurul S Hamami/sumber: Riset Puskapol UI (26 Mei 2019)